

ABSTRAK

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap entitas pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Hal inilah yang mendasari Pemerintah menetapkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dengan adanya PP ini setiap entitas Pemerintahan diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual paling lambat pada tahun 2015, sehingga menuntut semua elemen pemerintahan untuk mempersiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam mendukung penerapan SAP tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menerapkan SAP berbasis akrual yang diindikasikan dengan kesiapan SDM dan sistem informasi, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui penyebaran kuesioner di semua PPK SKPD dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan kabid akuntansi dan pelaporan BPKA Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan sudah siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual berdasarkan PP No.71 Tahun 2010. Sebagian besar karyawan PPK SKPD sudah siap untuk menerapkan SAP tersebut dan sistem informasi di setiap SKPD telah memadai. Namun, penerapan SAP ini harus tetap diikuti dengan adanya pelatihan dan pendampingan mengingat kebijakan ini masih baru. Kendala dalam penerapan SAP berbasis akrual antara lain kurangnya karyawan PPK SKPD yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, pola rekrutmen yang belum mendukung, kurangnya pendampingan dan bimbingan teknologi, dan membutuhkan biaya yang besar dalam penerapannya.

Kata Kunci: SAP berbasis akrual, SDM, dan sistem informasi.